



Membangun Aktor Politik Berkeadaban: Peran Nilai Spiritual dalam Menjaga Tatanan Demokrasi Indonesia di Era Post-Truth

Muhammad Mukhriz Zakaria¹⁾, Nuke Faridha Wardhani¹⁾, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti¹⁾

¹⁾ Universitas Airlangga

*Correspondence: muhammad.mukhriz.zakaria-2024@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tantangan masyarakat Muslim dalam menjaga tatanan demokrasi Indonesia di tengah dominasi era post-truth. Fenomena politik yang sarat propaganda, polarisasi identitas, dan disinformasi telah merusak keadaban politik nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan fokus pada nilai spiritual dalam Islam, khususnya melalui pendekatan tazkiyatun nafs ala sufi, sebagai strategi pembentukan aktor politik berkeadaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas Islam memiliki peran penting dalam memperkuat tata laku politik yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Proses penyucian jiwa melalui praktik muhasabah, mujahadah, dan riyadhah dapat membentuk pribadi yang tahan terhadap manipulasi dan godaan kekuasaan. Pendidikan politik yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dapat menjadi solusi dalam membentuk generasi politik yang bersih dan berkomitmen pada nilai demokrasi profetik. Temuan ini menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai spiritual dalam politik kontemporer untuk membangun tatanan demokrasi Indonesia yang beradab dan tahan terhadap krisis post-truth.

Keywords: Aktor Politik, Keadaban Demokrasi, Nilai Spiritual, Tazkiyatun Nafs, Post-Truth

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Pendahuluan

Mengemukannya narasi tentang politik penuh kebohongan, kepalsuan, pencitraan, dan penuh propaganda yang telah mengguncang fondasi tatanan konstitusional Indonesia merupakan dinamika yang tidak kunjung ada habisnya. Sebagaimana yang terjadi pada proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, fenomena ini dihiasi dengan teknik propaganda politik seperti *Firehose of Falsehood* yang menyebarkan informasi secara cepat, berulang-ulang, tanpa memedulikan akurasi faktual (Haqqi, 2020). Dengan demikian, maka dalam membangun tatanan politik nasional yang stabil dan berkeadaban, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius yang bersifat multidimensi. Fitrah atas keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai dari bangsa Indonesia harus tetap terintegrasi dalam satu kesatuan, baik melalui nilai-nilai agama atau nilai-nilai budaya agar tidak mudah terpecah akibat dilema-dilema perubahan yang terjadi. Di era globalisasi, masyarakat demokrasi menghadapi ancaman yang resisten terhadap munculnya konflik akibat dominasi era *post-truth*. Kondisi dimana emosi atau penilaian subjektif lebih didahulukan dan mengesampingkan fakta objektif (Bufacchi, 2020). Dalam proses perubahan ini, kehidupan emosional manusia mengalami erosi, dan berlanjut pada pemiskinan spiritual.

Di tengah berkembangnya ideologi sekuler yang tidak lagi mendasarkan ajaran agama dalam segala aktivitas kehidupan sosial, kemajemukan dan keberagaman yang ada justru menjadi sebuah ancaman. Terlebih akibat munculnya paradigma *post-truth* yang mampu menggeser interpretasi khlayak terhadap suatu kebenaran. Zaluchu (2020) dalam penelitiannya berjudul "Dinamika Hoax, Post-truth, dan Response Reader Criticism dalam Rekonstruksi Kehidupan Beragama" menunjukkan bahwa dimensi spiritual perlu menjadi perhatian penting bagi masyarakat agar mampu bertahan dari gejala sosial budaya dan politik di era modern yang cenderung diwarnai dengan manipulasi fakta. Menurutnya, kesadaran dalam beragama akan membantu kesiapan seseorang dalam menghadapi tantangan peradaban digital. Kesadaran dalam beragama ini, menurut Rozak (2024), berkaitan dengan kesadaran humanisme yang dapat dibentuk melalui integrasi antara pendidikan Islam dan

etika global. Nilai-nilai etika tentang kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam pendidikan Islam ini selaras dengan tujuan etika global, terutama dalam mempromosikan perdamaian dunia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, umat Islam di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadikan perdamaian dan harmoni sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat yang multikultural.

Selain dampak dari manipulasi informasi, kualitas politik nasional juga diperparah oleh pudarnya orientasi nilai dalam praktik politik dan lemahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya etika publik. Ketidakkonsistenan “aktor publik” dan “orang-orang terdidik” lain dalam menjalankan peran sosialnya terlihat pada maraknya politik transaksional di Pemilu 2024 dan sederet kasus problematik lain yang menunjukkan bagaimana kekuasaan semakin dijalankan tanpa mempertimbangkan aspek moral. Bagi [Thomas B. Pepinsky \(2024\)](#) dalam salah satu tulisan jurnalnya yang berjudul “*Why Indonesia’s Democracy Is in Danger*”, demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 mengalami kemunduran akibat mayoritas pemilih memilih calon presiden dengan latar belakang masa lalu yang kelam. Proses menuju kontestasi pemilu 2024 tersebut juga diwarnai oleh pemberhentian tidak hormat kepada Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi ketika menangani perkara uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang diduga tindakannya bertujuan untuk memuluskan kepentingan Jokowi dan keluarganya serta Prabowo sendiri (Tempo, 2023). Hal ini menunjukkan adanya krisis sosok teladan dalam diri para pemangku kebijakan, dimana nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas budaya bangsa justru terpinggirkan oleh kepentingan segelintir orang.

[Anggriani \(2024\)](#) dalam penelitiannya berjudul “Dinamika Politik Pemilu dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam” masih ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam Islam yang terlihat pada praktek politik uang, *black campaign*, hingga kecurangan dalam penghitungan suara yang masih terjadi pada pelaksanaan demokrasi dan sistem Pemilu di Indonesia. Fenomena *black campaign* atau propaganda politik yang menyebarkan fitnah atau hoaks untuk mencoreng lawan politiknya ini juga terjadi pada Pilkada maupun Pilpres serentak 2024 dan dalam dinamika politik pemilu sebelumnya, yakni tahun 2014 dan 2019 melalui pemanfaatan isu-isu agama dan identitas (Hannan, 2023). Hal ini tidak hanya mengancam stabilitas masyarakat di tingkat akar rumput, tetapi juga berpotensi besar merusak masa depan dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia [Gunawan & Ratmono \(2021\)](#) dalam bukunya berjudul “Demokrasi di Era *Post-truth*” menyebutkan, bahwa perdebatan yang didukung oleh platform media di era *post-truth* tidak lagi mengedepankan pemikiran atau pendapat yang rasional, melainkan mendahulukan argumentasi yang bersifat emosional dan preferensi personal. Di sisi lain media sosial menjadi panggung utama dalam perdebatan massa, penggunaannya juga menjadi peluang bagi tim kampanye masing-masing kubu, termasuk relawan dan massa pendukung untuk melakukan praktik mobilisasi massa dan agenda kampanye politik.

Dalam merespon polarisasi yang terjadi akibat perbedaan pilihan politik dan keberlimpahan informasi ini, berbagai kajian terdahulu telah mengangkat pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa. [Setyawan et al., \(2024\)](#) menekankan pentingnya etika Islam yang didalamnya terdapat nilai moral dan spiritual untuk membantu memulihkan kualitas pemerintahan yang dinilai belum bebas dari konflik etika. Sementara [In’amuazzahidin \(2015\)](#) mengangkat pemikiran beberapa tokoh pemikir Islam terdahulu dan lebih condong kepada pemikiran Al-Farabi tentang perlunya pemimpin yang berkualitas dan berkapabilitas secara kolektif. Selain itu, faktor seperti membela kepentingan rakyat banyak (yang tertindas) di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan sikap adil dan jujur juga perlu menjadi budaya politik yang dilestarikan agar dapat mencapai kehidupan politik yang ideal. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyentuh aspek krisis *post-truth* secara spesifik di era modern, sehingga belum menyajikan pendekatan yang kontekstual terhadap tantangan demokrasi dalam fenomena *post-truth*.

Prof. Azyumardi Azra dalam Kompas (2021) menyatakan, bahwa politik yang berkeadaban harus didasarkan pada norma dan regulasi yang telah digariskan dalam sistem politik, bukan sekadar permainan kekuasaan. Sedangkan demokrasi yang hanya berorientasi pada kepentingan pragmatis dan transaksional tanpa nilai etika dan moralitas akan terus mengalami kemunduran. Perdebatan sehat dalam politik yang kian tergantikan oleh narasi manipulatif, ujung-ujungnya hanya akan memperkeruh kestabilan dan suasana politik nasional. Dalam konteks kehidupan politik saat ini, [Nansi et al., \(2024\)](#) dalam buku berjudul “Pendidikan Politik” melihat generasi muda dengan populasi yang berjumlah sekitar 74,93 juta jiwa memiliki peran penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik. Menurutnya, pendidikan politik menjadi salah satu upaya di era *post-truth* yang dapat dilakukan untuk menjaga

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap perilaku yang beradab dan demokratis. Sedangkan dalam penelitian ini, kajian akan fokus menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh kalangan masyarakat Muslim dan bagaimana nilai spiritual mampu memperkuat tata laku aktor-aktor politik Islam, sehingga muncul kemampuan dari individu untuk menciptakan tatanan politik nasional yang beradab.

Metode

Berdasarkan fokus penelitian yang membahas peran nilai spiritual dalam membentuk aktor politik berkeadaban di tengah tantangan era *post-truth*, pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode berbasis studi literatur (*library research*). Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, meliputi: artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional bereputasi; buku-buku akademik yang relevan dengan kajian politik, demokrasi, etika Islam, dan spiritualitas; hasil penelitian terdahulu yang membahas fenomena *post-truth*, politik identitas, dan krisis nilai; sumber berita kredibel (Kompas, Tempo, dan lainnya) yang digunakan sebagai pelengkap deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengevaluasi literatur yang relevan menggunakan kata kunci seperti: politik *post-truth*, nilai spiritual dalam Islam, etika kepemimpinan, kemunduran demokrasi di Indonesia, dan propaganda politik. Database jurnal yang digunakan mencakup Garuda, Sinta, dan Google Scholar.

Objek material dalam penelitian ini adalah fenomena degradasi moral dalam praktik politik di Indonesia, khususnya menjelang dan selama Pemilu Presiden 2024 yang ditandai dengan menguatnya propaganda *post-truth*. Fokus objek ini mengarah pada perilaku politik yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan integritas dalam ruang demokrasi, serta keterkaitannya dengan krisis kepemimpinan yang kehilangan landasan etika dan spiritualitas. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, konteks, serta peran nilai-nilai spiritual Islam dalam membentuk karakter aktor politik yang beradab. Desain ini berusaha menggali relasi antara fenomena politik *post-truth* dengan pemiskinan nilai spiritual serta solusinya dalam kerangka demokrasi etis dan konstitusional. Analisis dilakukan dengan cara mengomparasikan temuan dari berbagai sumber untuk kemudian disintesis menjadi argumentasi baru yang menekankan bahwa pendekatan spiritual berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi fondasi dalam membentuk aktor politik yang beradab di tengah tantangan era *post-truth*.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Akibat Dominasi Era *Post-truth*

Dominasi *post-truth* dalam politik Indonesia tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas informasi publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan pergeseran orientasi nilai dari kolektivitas tradisional menuju individualisme modern, yang berpotensi melemahkan jati diri bangsa Indonesia dalam bingkai kebhinekaan. Hannan (2023) melihat diskursus politik nasional pada Pilpres 2024 memiliki tantangan yang sama seperti Pilpres 2014 dan 2019, tepatnya ketika kanal-kanal media informasi publik dibanjiri dengan narasi-narasi kebencian dan kebohongan. Bahkan, para elit politisi diduga dengan sengaja memanfaatkan kepiawaian mereka dalam memainkan narasi media dengan tujuan untuk memenangkan kelompoknya dalam kontestasi politik elektoral maupun politik nasional. Dalam penelitiannya, disebutkan ada tiga gejala politik dalam era *post-truth* sepanjang periode 2016-2023, yakni politik identitas, politisasi agama, dan politik data. Jika terus dibiarkan, perhelatan politik seperti itu akan terus mengalami krisis kearifan dan etika.

Menurut Bufacchi (2020), *post-truth* bukan sekadar kebohongan biasa, tetapi suatu era ketika kebenaran kehilangan substansinya karena ditaklukkan oleh emosi dan opini personal. Masyarakat tidak lagi mengandalkan verifikasi fakta, melainkan membenarkan apa yang “dirasa benar” secara emosional. Ini sangat berbahaya dalam konteks masyarakat majemuk seperti Indonesia, di mana sentimen agama dan etnis bisa dengan mudah dimanipulasi menjadi alat konflik politik sehingga berujung pada tindakan fanatisme yang mengesampingkan dorongan logika akal sehat. Pola penyebaran hoaks politik memperlihatkan peningkatan secara signifikan menjelang momentum politik elektoral, terutama dalam Pemilu dan Pilkada yang dilakukan secara serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota pada 27 November 2024 lalu. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Kompas (2024), terdapat 3.235 berita hoaks terkait Pemilu 2024 yang tersebar di berbagai platform media sosial. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.971 berita telah berhasil dihapus, sementara sisanya diberi tanda hoaks tanpa dihapus karena dinilai tidak memiliki dampak polarisasi yang cukup

besar. Data ini menunjukkan bahwa kemunculan media sosial memperluas ruang lingkup pertarungan narasi politik yang penuh dengan informasi yang bias dan tidak terverifikasi kebenarannya.

Dampak *post-truth* juga terjadi pada saat pilkada tahun 2024 kemarin, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai melontarkan pernyataan berupa *black campaign* atau kampanye hitam oleh Tim Sukses (Times) Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). *Black campaign* dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan tujuan pembentukan opini, pencemaran nama baik dan rekayasa karakter buruk calon kepala daerah melalui pemaparan data-data yang direkayasa sehingga terlihat valid dan terpercaya, yang mana hal ini dapat memengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tentang elektabilitas calon kepala daerah (Sirait, 2024). Sebelumnya, Ahok mengatakan pasangan Pramono-Rano ideal untuk memimpin Jakarta. Ahok lantas menyinggung pasangan lain di Pilkada Jakarta 2024 selain Pramono-Rano berbahaya. "Dan kita tahu, saya bukan mau menjelekkan pasangan yang lain gitu ya. Pasangan yang lain itu kadang-kadang bisa lebih berbahaya daripada yang dulu, tahu nggak. Ini casingnya lebih bagus, ini bahaya ini. Jadi kita jangan terlalu mau percaya seperti itu," ujarnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjelaskan pernyataannya terkait pasangan calon lain yang berbahaya. Ahok mengatakan pasangan lain berbahaya lantaran kerap mengumbar janji manis (Detik, 2024).

Dalam perspektif Islam, konflik akibat dorongan hawa nafsu yang berujung pada tindakan fitnah adalah tanda dari dominasi nafs ammarah (nafsu yang mendorong kejahatan) yang masih melekat dalam diri seseorang. Dalam tesis yang ditulis oleh Rahmat (2022), surah Yusuf ayat 53 dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa nafsu merupakan tempat bernaungnya segala kejahatan dan sumber dari perilaku tercela yang berpotensi mendatangkan kemurkaan Tuhan. Berkaitan dengan nafsu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa nafsu (makan, minum, dan menikah) diciptakan ada pada diri manusia guna menjaga kelangsungan dalam hidup. Namun, nafsu yang tidak dikendalikan inilah yang nanti dapat menjadi hambatan manusia dalam melakukan kebaikan. Sehingga bisa dikatakan, bahwa ketergantungan masyarakat modern terhadap kemajuan teknologi komunikasi dan tanpa diimbangi dengan kemampuan akal untuk membedakan mana yang baik dan buruk di era *post-truth* ini merupakan indikasi dari adanya gejolak nafsu yang masih belum bisa dikendalikan. Padahal, menurut Zaluchu (2020), agama dapat menjadi bekal perubahan yang efektif di tengah masyarakat untuk tujuan mempersatukan dan bukan untuk memecah belah. Dalam tulisannya juga dijelaskan bahwa solusi untuk menghadapi dampak badai informasi ialah melalui edukasi tentang literasi digital dan menerapkan prinsip Reader Response Criticism (RRC), dimana penafsiran dan keputusan kebenaran terhadap segala informasi berada di tangan pembaca.

Merosotnya Keadaban Politik pada Aktor Politik

Menurut pandangan Quraish Shihab dalam Zhafir (2024), politik berkeadaban merupakan istilah dalam menjalankan aktivitas politik dengan prinsip moral dan nilai-nilai agama. Dalam pandangannya, penting bagi manusia yang diamanahi jabatan untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, bersikap adil, dan menghormati kedaulatan hukum sehingga terciptanya tatanan politik yang lebih berkeadaban dan berkelanjutan dengan memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan kekuasaan semata. Ironisnya, keadaban yang seharusnya menjadi pilar penopang bangsa ini kian memudar akibat tindak-tanduk para pejabat publik itu sendiri. Dalam salah satu majalah Tempo edisi 11 April 2025 yang berjudul "KPK Makin Rusak Setelah Diseret ke Danantara" memberi gambaran terkait bagaimana pengelolaan negara yang seharusnya menerapkan prinsip good corporate governance diabaikan. Penunjukan Ketua KPK Setyo Budiyanto sebagai anggota Komite Pengawas dan Akuntabilitas di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi polemik terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikorbankan. Sedangkan, lapisan yudikatif seharusnya perlu bebas dari benturan kepentingan di dalamnya agar tidak ada kekhawatiran dalam lapisan masyarakat terhadap praktik-praktik ilegal yang mungkin saja terjadi.

Alih-alih mengedepankan sikap integritas dan transparansi, para elite justru gemar memelihara sikap oligarki dan membudayakan praktik politik transaksional. Kegemaran ini sebetulnya telah dimulai sejak konstelasi politik Pemilu 2024 lalu, dimana ketiga pasangan calon yang berkontestasi ditopang oleh lingkaran oligarki. Sebelumnya, proses menuju kontestasi pemilu 2024 tersebut diwarnai oleh pemberhentian tidak hormat kepada Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi ketika menangani perkara uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip

Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada 11 Juli 2023 lalu. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut Tempo membuktikan adanya cawe-cawe dari Anwar Usman untuk meloloskan keponakannya agar maju dalam kontestasi pemilu mendampingi Prabowo (Tempo, 2023). Noor (2020), melihat fenomena oligarki ini sebagai penuh dengan kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat. Kepentingan ini dinilai jahat karena dapat mengorbankan kebahagiaan rakyat serta mengesampingkan kebutuhan mereka demi kepentingan pribadi dan perilaku egois.

Selanjutnya, Pada pertengahan Maret 2025, saat Tempo sedang ramai-ramainya mengalami sederet teror, mulai dari kiriman paket kepala babi tanpa telinga, bingkisan berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong, hingga kejahatan digital berupa doksing terhadap Francisca Christy Rosana alias Coca, jurnalis desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus. Muncullah pernyataan kontroversial soal teror kepala babi ke kantor Tempo oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang dinilai “teledor” dan “keliru” turut memperkeruh kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik. “Itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira Beliau menyesal,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 6 April 2025. Hal ini membuat Prabowo mengingatkan kepada semua anggota kabinet untuk mengedepankan rasa simpati dan empati serta menghindari komunikasi yang multitafsir. Tak lama kemudian, pada 21 April Hasan Nasbi resmi mengirim surat pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden melalui Seskab dan Mensesneg (Tempo, 2025).

Menurut Zahro (2023), fenomena di atas membuat generasi muda memandang politik sebagai suatu hal yang negatif, yaitu menganggap politik hanya tentang memperebutkan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan untuk masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan generasi muda cenderung tidak ingin tahu terhadap kondisi politik di Indonesia karena image politik yang ditampilkan tidak sesuai dengan preferensi mereka (Irwan et al., 2021 dalam Zahro et al., 2023). Persoalan-persoalan lain yang menyangkut politik yang membuat generasi muda khawatir adalah maraknya tulisan yang bersifat provokatif dan kampanye hitam di media sosial. Tentunya mereka merasa marah sekaligus takut dengan informasi hoaks. Menurut mereka, jika tulisan provokatif atau hoaks tentang politik kian menyebar, semakin banyak pula orang yang akan merasa curiga atau saling membenci. Oleh karena itu, perlu upaya dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui edukasi secara menyeluruh, baik di tingkat formal maupun informal untuk memberikan kontribusi positif dalam membentuk arah demokrasi Indonesia ke depan, mengukuhkan partisipasi publik, dan menciptakan ruang diskusi yang sehat untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Zahro, 2023).

Dalam konteks ini, Siah, et al., (2024) menawarkan kepemimpinan Islami sebuah kerangka solusi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga praktis. Konsep amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkar) merupakan landasan yang bisa diterapkan oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda dalam membimbing umat untuk menjauhi tindakan-tindakan yang merugikan. Ketika manusia bisa seimbang dalam menata hubungan secara horizontal (manusia dengan Tuhan) dan vertikal (manusia dengan manusia), maka akan tercipta kesejahteraan baik di dunia secara global maupun di dunia Islam sendiri. Nilai-nilai Islam memberikan panduan moral yang jelas, seperti pentingnya keteladanan pemimpin (uswatun hasanah), tanggung jawab sosial, serta kemampuan untuk membangun kesadaran kolektif di dalam komunitas (Badarussyamsi et al., 2021). Tidak hanya pemilih, para aktor politik muda yang muncul pun menunjukkan pola serupa. Mereka cenderung pragmatis, haus eksistensi, dan menggunakan pendekatan populis yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab etis. Kasus-kasus seperti keterlibatan figur publik dalam menyebar hoaks atau aktif dalam kampanye negatif menunjukkan kemerosotan nilai moral dalam orientasi kepemimpinan.

Peran Pendidikan Politik Berbasis Nilai Spiritual dalam Membangun Tatanan Politik Nasional

Gejala “ketamakan” terhadap kekuasaan kian masih menjadi problematik bagi bangsa Indonesia di era modern. Dalam menundukkan ego dan nafsu tersebut, manusia membutuhkan aspek spiritual agar mampu bersikap adil, jujur, dan tenang dalam menyikapi perubahan yang semakin tidak terarah. Menurut Mahmud (2018), berbagai jalan keluar yang ditawarkan guna mengatasi kedahagaan spiritual ini, mulai dari yoga, meditasi, *new age spirituality* dan bentuk-bentuk pelajaran mistik lainnya. Namun, Islam sebagai ajaran yang sempurna telah memiliki perangkat ajarannya sendiri yang bernama Tazkiyatun Nafs atau Penyucian Jiwa. Solusi dari krisis politik *post-truth* dan merosotnya keadaban publik terletak pada transformasi pendidikan politik berbasis nilai

spiritual. Pendidikan semacam ini bukan hanya tentang memahami prosedur pemilu atau sistem politik, tetapi membentuk kesadaran batin individu terhadap makna kekuasaan sebagai Amanah [Setyawan et al., \(2024\)](#) mengemukakan bahwa pendidikan politik berbasis etika Islam dan nilai moral memiliki kekuatan untuk memperkuat ketahanan moral masyarakat dalam menghadapi godaan kekuasaan dan propaganda. Nilai spiritual menjadi fondasi untuk menciptakan aktor politik yang mampu membentengi hati dari dekadensi moral juga sekaligus sebagai sarana terapi ruhani yang efektif.

Dalam tradisi tasawuf, pendidikan bukan sekadar pengajaran atau transfer pengetahuan dan keterampilan (ta'lim), tetapi pembinaan (tarbiyah) yang didalamnya terdapat metode penyucian (tazkiyah) sebagai prises pembentukan dan pembangunan karakter pada aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik individu yang sesuai dengan prinsip-rinsip maupun ajaran Islam ([Anurogo et al., 2023](#)). Metode tazkiyatun nafs mengajarkan pentingnya riyadhah (latihan spiritual) untuk mensucikan jiwa dan hati dari pelbagai dosa dan sifat-sifat tercela yang kemudian dibarengi dengan mengembangkan perilaku-perilaku baik dan terpuji ([Harahap & Ependi, 2023](#)). Jika nilai-nilai ini diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan politik, baik formal maupun non-formal, maka individu akan tumbuh sebagai sosok yang memiliki basirah (mata batin), yang mampu melihat kebenaran dan menghindari manipulasi. Ini menjadi penting dalam konteks Indonesia, di mana nilai agama sangat memengaruhi perilaku sosial dan politik. Sebagaimana konsep tazkiyatun nafs menurut tasawuf [Al-Ghazali dalam Harahap & Ependi \(2023\)](#), bahwa seorang haruslah menjaga batinnya agar tidak tercemar dari rayuan nafsu dan godaan setan. Beliau menekankan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang telah mengalahkan sifat riya' (pencitraan), hasad (dengki), tamak terhadap jabatan, dan berbagai sikap lain yang dekat dengan sifat kebuasan maupun kebinatangan. Generasi muda dan aktor politik harus belajar untuk tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual melalui proses mujahadah (melawan hawa nafsu) dan murāqabah (introspeksi diri di hadapan Allah). Pendidikan politik yang menanamkan nilai-nilai ini akan melahirkan politisi muda yang rendah hati, bijak, dan bersih dari niat duniawi yang koruptif.

Langkah-langkah konkret juga perlu dilakukan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk membangun modul pendidikan politik yang berbasis spiritualitas. Kegiatan keagamaan di kampus dan pesantren perlu dikaitkan dengan isu-isu sosial politik agar terjadi sintesis antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Menurut [In'amuzzahidin \(2017\)](#), tokoh-tokoh sufi klasik seperti Al-Farabi telah menekankan bahwa negara yang ideal hanya dapat dibangun oleh pemimpin yang menjalani proses tazkiyah, karena dari situlah muncul akhlak mulia dan kemauan untuk berlaku adil kepada rakyat. Dengan demikian, pendekatan tasawuf bukan hanya spiritualitas personal, tetapi memiliki implikasi sosial-politik yang sangat kuat dalam memperbaiki demokrasi.

Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim Indonesia dalam konteks demokrasi modern tidak hanya berkisar pada disinformasi dan krisis kepercayaan terhadap institusi, tetapi juga pada lemahnya fondasi etis dalam perilaku politik. Era post-truth telah mengaburkan batas antara fakta dan opini, sehingga masyarakat—terutama yang religius—perlu memiliki ketahanan spiritual yang mumpuni untuk memilah informasi dan menjaga kohesi sosial. Dalam konteks ini, masyarakat Muslim menghadapi tantangan ganda: menjaga keutuhan nilai-nilai agama sekaligus berpartisipasi dalam tatanan politik yang kian terpolarisasi oleh narasi identitas dan propaganda kekuasaan. Penelitian ini menegaskan bahwa spiritualitas Islam melalui metode *tazkiyatun nafs* memiliki potensi besar dalam membentuk tata laku politik yang berkeadaban. Penyucian jiwa dalam tradisi sufi tidak hanya bersifat individual, tetapi memiliki implikasi sosial-politik yang luas. Nilai-nilai seperti muhasabah, mujahadah, shidq, dan ikhlas menjadi pilar utama dalam membentengi aktor politik dari kecenderungan riya', hasad, dan ketamakan akan jabatan. Dengan internalisasi nilai-nilai ini, masyarakat Muslim, khususnya generasi muda dan pemimpin politik, dapat menampilkan etika kepemimpinan yang selaras dengan cita-cita demokrasi yang beradab, yakni jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Integrasi nilai spiritual ke dalam pendidikan politik menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi aktor politik yang beradab. Penanaman nilai tazkiyah dalam ranah pendidikan formal, pesantren, komunitas keagamaan, hingga ranah kebijakan publik perlu dioptimalkan agar lahir pemimpin dan warga negara yang tangguh secara moral. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi fondasi moral pribadi, tetapi juga motor kolektif yang mampu menjaga dan membangun tatanan demokrasi Indonesia yang stabil, adil, dan bermartabat di tengah ancaman post-truth yang terus berkembang.

Reference

- Anggraini, F. A. (2024). Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(4).
- Anurogo, D., & Napitupulu, D. S. (2023). *Esensi Ilmu Pendidikan Islam: Paradigma, Tradisi dan Inovasi*. Pustaka Peradaban.
- Azra, A. (2021). Membangun keadaban politik. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/18/membangun-keadaban-politik>
- Badarussyamsi, B., Ridwan, M., & Aiman, N. (2020). Amar Ma 'Ruf Nahī Munkar: Sebuah Kajian Ontologis. *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 270-296.
- Bufacchi, V. (2020). What's the difference between lies and post-truth in politics. *A philosopher*.
- Dongoran, H. A., & Pramono, S. (2025). Blunder komunikasi pemerintahan Prabowo. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/blunder-komunikasi-pemerintahan-prabowo-1230625>
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth (2021)*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Haqqi, A. (2020). Propaganda Firehose of Falsehood Pada Pemilu 2019 di Indonesia. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(2), 175-185.
- Hannan, A. (2023). Propaganda Politik Pasca Kebenaran (Post Truth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 6(1), 51-82.
- Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *Tazkiyatun Nafs Dalam Membentuk Akhlakul Karimah*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- In'amuzzahidin, M. U. H. (2015). Etika Politik Dalam Islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(2), 89-106.
- Ikhsanudin, A. (2024). Ahok sebut Pasangan lain Berbahaya, Kubu RK anggap Black Campaign. *Detiknews*. <https://news.detik.com/pilkada/d-7574172/ahok-sebut-pasangan-lain-berbahaya-kubu-rk-anggap-black-campaign>
- KPK Pengawas danantara. (2025). *Tempo*. <https://www.tempo.co/kolom/kpk-pengawas-danantara-1229862>
- Mahmud, A. (2018). Peran Dan Respon Tasawuf Terhadap Problematika Era Modern. *Jurnal Dikdas Bantara*, 1(1).
- Nansi, W. S., & SH, M. (2024). BAB 5 Pendidikan Politik Bagi Generasi Z. *Pendidikan Politik*, 57.
- Noor, F. (2020). *Demokrasi dan Oligarki*. Bibliosmia Karya Indonesia.
- Pepinsky, Thomas B. (2024, April 1). Why Indonesia's democracy is in danger | Journal of Democracy. *Journal of Democracy*. <https://www.journalofdemocracy.org/online-exclusive/why-indonesias-democracy-is-in-danger/>
- Rahmat, I. (2022). *KECENDERUNGAN NAFSU DAN PENGENDALIANNYA PERSPEKTIF SURAT YŪSUF* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Siah, K., Sakinah, P., & Mawardi, M. (2024). Peran Kepemimpinan Islam dalam Mencegah Tindak Pidana Dan Krisis Sosial di Kalangan Pemuda Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7734-7746.
- Sirait, G. P. (2024). *ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KAMPANYE HITAM (BLACK CHAMPAIGN) MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).
- Setyawan, M. A., Sulkipli, M. S. A. A., Rain, T. J. F., & Kurniati, K. (2024). Urgensi Etika Islam dalam Politik Kontemporer. *Aksioreligia*, 2(2), 56-64.
- Setuningsih, N. (2024). Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019.

KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/19/15502711/menkominfo-klaim-situasi-media-sosial-usai-pemilu-2024-lebih-baik-ketimbang>

Septian, A. (2023). Bukti nyata cawe-cawe paman Anwar. Tempo. <https://www.tempo.co/kolom/bukti-nyata-cawe-cawe-paman-anwar-819162>

Rozak, A. (2024). *MEMBANGUN KEADABAN DEMOKRASI: BELAJAR DARI GERAKAN SOSIOKULTURAL CAK NUR DAN GUS DUR*. CV. AZKA PUSTAKA.

Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.

Zaluchu, S. E. (2020). Dinamika hoax, post-truth dan response reader criticism di Dalam Rekonstruksi Kehidupan Beragama. *Religió Jurnal Studi Agama-agama*, 10(1), 98-117.

Zhafir, M. R. (2024). *KONSEP POLITIK BERKEADABAN PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)